

## ABSTRAK

### **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 5 TAHUN 2012 DALAM PENERBITAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KOTA MEDAN**

**Nama : Hanna Maria Lubis**  
**Departemen : Ilmu Administrasi Negara**  
**Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Universitas : Universitas Sumatera Utara**  
**Dosen Pembimbing : Drs. M. Ridwan Rangkuti, M.Si**

Implementasi kebijakan merupakan wujud dari tahapan dari suatu kebijakan publik yang sudah dirumuskan. Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2012 Dalam Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Medan merupakan terobosan untuk meningkatkan penataan pola penggunaan ruang kota dalam rangka menerbitkan bangunan gedung yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2012 dalam Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Medan.

Di dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan metode analisis kualitatif dengan maksud yang memusatkan perhatian terhadap masalah-masalah atau fenomena-fenomena yang ada pada saat penelitian dilakukan, kemudian menggambarkan fakta-fakta dan menjelaskan keadaan dari objek penelitian yang sesuai dengan kenyataan sebagaimana adanya dan mencoba menganalisa untuk memberikan kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Tata Bangunan, Staff Kepala Seksi Perencanaan Bangunan dan Kepala Seksi Penyuluhan, dan Informan utama yaitu 30 orang masyarakat yang mengurus izin mendirikan bangunan di Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Medan.

Dari hasil penelitian Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2012 Dalam Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Medan terdapat variabel yang bermasalah seperti Sumber Daya Manusia dan fasilitas. SDM khususnya pada personil bidang pengawasan hanya 43 orang sehingga pengawasan tidak maksimal untuk mengawasi setiap bangunan gedung. Untuk itu, perlu dilakukan penambahan personil pada bidang pengawasan sebanyak 20 orang guna mendukung pembongkaran bangunan dengan maksimal, serta fasilitas alat-alat berat dalam mendukung pembongkaran bangunan tersebut.

---

*Kata-Kata Kunci (Key words): Implementasi Kebijakan, Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2012 Dalam Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Medan*